



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 26—28 AGUSTUS 2024

=====

Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan tanggal 26—28 Agustus 2024, dipimpin oleh Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. dengan diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI dari perwakilan berbagai Fraksi serta pejabat Kemendikbudristek RI. Kunker dilakukan untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Timur, dan untuk melihat secara langsung perkembangan program merdeka belajar, khususnya terkait pelaksanaan PPDB dan program penggerak (program guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak). Tim Kunker diterima oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, A.KS, M.AP. dan dihadiri pula oleh kepala dinas pendidikan, balai besar penjaminan mutu pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan daerah, dan para pelaku pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

Kinerja bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur secara umum tergolong baik, yang terindikasi dari kemenangan pada lomba kompetensi siswa nasional (LKS) SMK tingkat nasional ke XXXII Tahun 2024 tanggal 19—24 Agustus 2024 dengan memperoleh 15 medali emas. Kebijakan anggaran pendidikan wajib 20% untuk tahun 2024, Jawa Timur telah mengalokasikan lebih dari Rp.8,9 triliun atau 26,26% dari APBD. Alokasi biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tercatat lebih dari Rp.1,38 triliun.

Terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 dan sistem zonasi, Provinsi Jawa Timur dan kebijakan merdeka belajar guru penggerak, tidak mengalami kendala yang berarti, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap implementasi kebijakan merdeka belajar untuk guru penggerak, dilakukan dengan berkolaborasi melalui komunitas belajar, webinar dan diskusi yang terus berfokus pada pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, termasuk mendukung kebijakan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah.

Provinsi Jawa Timur mendukung implementasi kurikulum merdeka, mengajar menggunakan teknologi, dan melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan hingga melakukan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan, sehingga turut membantu upaya pencegahan dan meredam kecemasan orang tua terhadap lingkungan sekolah yang rentan terhadap kekerasan.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, dan meminta Jawa Timur untuk menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat terhadap beberapa permasalahan bidang pendidikan yang masih terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.